

DAFTAR PUSTAKA

- Lekipiouw, S. H., Salmon, H., & Lainsamputty, N. (2021). *Model Pengawasan dan Tata Hubungan Kewenangan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 14-28.
- Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., Sari, R., Sayekti, N. W., Mauleny, A. T., & Purwanto, N. P. (2023). *Dampak Program Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Bagi Umkm Semasa Pandemi Covid-19*. Kajian, 27(2), 195-208.
- Asia, N. Artikel Sistem Ekonomi Laissez Faire dan Adam Smith.
- Atmanti, H. D. (2017). *Kajian Teori Pemikiran Ekonomi Mazhab Klasik dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 2(2), 511-524.
- Bencana, B. N. P. (2016). *Definisi Bencana*.
- Nasrulloh, A. B. (n.d.). *Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Sosial Covid-19 Dalam Perspektif Pidana Sebagai Pemberatan Pidana*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>
- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 240. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>
- putusan_3_pid.pra_2021_pn_blg_20231026151756*. (n.d.).

- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandaannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pusata Utama, 2013
- Ubwarin, E., Hehanussa, D. J. A., Patty, J., & Salamor, A. M. (2021). Kekebalan hukum pidana dalam penanganan bencana non-alam akibat SARS-CoV-2 (Legal Immunity in Disaster Management non-Natural Due to SARS-COV-2). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 13-2
- Latjeno, M. A., Ikshan, A. Y., & Isnawati, M. (2022). Eksistensi Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Pada Saat Bencana. *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tata Sosial*, 1(2).
- Simorangkir, A. *Analisis Hukum Terhadap Potensi Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19*.
- Oetari, A. A. P. N., & Mahmud, A. (2021). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 96-103.
- SELVIA LABEDA, S. E. L. V. I. A. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19* (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)).
- Kristina, M. (2021). Tipologi Penindakan Kejahatan Korporasi Dalam Korupsi Dana Bantuan Pandemi Covid-19. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 24(01), 1-13.

- Grigorius, E. S., & Kholiq, M. N. (2021). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Legislatif*, 16-27.
- Lubis, M. D. (2022). *Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pada Masa Pandemic Covid-19 Dihubungkan Dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Januardy, I., & Salsabila, M. (2023). Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penganggaran Dana Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 328-343.
- Ginting, A. M. (2023). *COVID-19 Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. *Kajian*, 25(4), 285-300.
- Marpaung, L. (2009). *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*.
- Astuti, I. (2014, December). *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. In *Forum Ilmu Sosial* (Vol. 41, No. 2).
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). *Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi*. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Hasanah, L. (2022). *Upaya Pengembalian Aset Negara Tindak Pidana Korupsi (Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006)*. *Jurnal Anti Korupsi*, 11(2), 41-55.

- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020). *Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Wawasan Yuridika, 4(2), 240-255.
- Elda, E. (2019). *Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Lex Lata, 1(2).
- Nomor, U. U. (31). Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Sadeli, W. H., & Undang-Undang, M. P. A. B. (2010). *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Sifuddin, B. (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 di Kabupaten Samosir*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 20422-20426.